

BAB 7

Pembangunan Perdesaan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Musi Rawas saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan. Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas adalah 43.300 KK atau 179.788 Jiwa, sebagian besar dari jumlah tersebut bermukim di perdesaan.

Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan lapangan kerja non pertanian (*non-farm activities*) guna menekan angka kemiskinan yang terus meningkat. Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan Koperasi, berbasis sumberdaya perdesaan serta terkait dengan kegiatan di kawasan agropolitan berpotensi menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi penduduk perdesaan.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan yang menghambat pengembangan perdesaan sebagai berikut: (1) terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas ; (2) lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial; (3) timbulnya hambatan distribusi dan perdagangan antar kecamatan; (4) tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan; (5) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ; (6) rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan ; (7) rendahnya kualitas SDM di perdesaan; (8) meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain ; (9) meningkatnya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup ; (10) lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; (11) lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

B. SASARAN

Lima tahun mendatang, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perdesaan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan sebagai penuplai utama Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan distrik;
2. Terciptanya lapangan kerja di perdesaan, akibat berkembangnya kawasan Agropolitan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta tidak bias jender;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan;
5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan jender;

C. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian (industri perdesaan dan jasa penunjang), diversifikasi usaha pertanian ke arah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan mengembangkan lapangan kerja di wilayah agropolitan;
2. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumberdaya lokal;
3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan;

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan resiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat;
6. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

D. PROGRAM

Pelaksanaan arah kebijakan di atas akan dilakukan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program bertujuan : (1) membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat; (2) meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk membangun kawasan perdesaan adalah:

- a. Bintek aparatur/ perangkat desa;
- b. Bantuan pembangunan masyarakat desa;
- c. Pelatihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- d. Bintek Perencanaan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
- e. Orientasi perangkat desa pengelola dana bantuan desa (BPMD);
- f. Usaha ekonomi produktif simpam pinjam (UED-SP);
- g. Bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- h. Lomba desa sehat;
- i. Pelatihan pengisian profil desa;
- j. Pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS);
- k. Sosialisasi teknologi tepat guna;
- l. Pemberdayaan BUMDES;
- m. Pembinaan PKK tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- n. Lomba terbaik 10 program pokok PKK dan P2W-KSS;
- o. Pembinaan desa proyek P2W-KSS;

2. Program – Program Terkait Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan pendidikan kecakapan hidup yang sesuai potensi dan karakter lokal;

3. Program Persiapan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi:

- a. Mendapatkan areal yang jelas mengenai letak, luas, dan batas serta tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- b. Terpenuhinya syarat penempatan yang memenuhi kriteria 4 L (Layak huni, Layak bekerja, Layak usaha, Layak Berkembang);
- c. Peningkatan SDM transmigrasi dan penduduk sekitar melalui program pelatihan-pelatihan dalam bidang sosial ekonomi dan budaya.